

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Pengeluaran per kapita memiliki dampak positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. Penelitian menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran per kapita dapat menurunkan persentase penduduk miskin. Sebagai contoh, dalam suatu studi, setiap peningkatan satu unit pengeluaran per kapita berkontribusi pada penurunan persentase penduduk miskin. (Putra, 2020) .

Variabel pendidikan, upah minimum, dan pengeluaran per kapita memberikan dampak positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Penelitian ini menyarankan perlunya upaya dari berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas pendidikan demi memperbaiki Kesejahteraan masyarakat. (Ningtias & Anwar, 2021) .

Variabel pendidikan menunjukkan pengaruh negatif yang signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Timur. Setiap tambahan satu tahun pendidikan di Jawa Timur dapat mengurangi jumlah penduduk miskin sebanyak 38.633,31 orang. Hal ini berarti bahwa peningkatan tingkat pendidikan akan mengurangi jumlah penduduk miskin di Jawa Timur. (Utami & Masjkuri, 2018) .

Secara parsial, variabel pendidikan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Bali. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan yang diperoleh, semakin besar kemungkinan seseorang untuk tidak termasuk dalam kategori miskin. (Wirawan & Sudarsana Arka, 2013) .

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menunjukkan hubungan negatif yang tidak signifikan dengan jumlah penduduk miskin. Penelitian mengungkapkan bahwa meskipun TPAK mengalami peningkatan, hal ini tidak selalu diikuti dengan ketersediaan lapangan kerja yang memadai, sehingga tidak berdampak positif pada penurunan kemiskinan. Keterbatasan lapangan kerja dan pertumbuhan populasi

yang pesat menyebabkan peningkatan jumlah pengangguran, yang pada akhirnya memperburuk kondisi kemiskinan. (Rasyadi, 2011) .

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) memiliki pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap kemiskinan, sementara Indeks Pertumbuhan Manusia (IPM) berpengaruh negatif dan signifikan. Selain itu, jumlah penduduk menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh selama periode 2010-2020.(Aulia, 2023) .

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Penduduk Miskin

Kotze (dalam Hikmat, 2004:6) Mengungkapkan bahwa masyarakat miskin memiliki kemampuan yang cukup baik dalam memanfaatkan sumber daya yang ada melalui peluang yang tersedia. Meskipun bantuan eksternal terkadang digunakan, tidak bisa dipastikan bahwa masyarakat akan sepenuhnya bergantung pada dukungan dari luar. Pendekatan pemberdayaan dianggap kurang efektif karena tidak ada masyarakat yang dapat hidup dan berkembang secara optimal jika terpisah dari komunitas lainnya. Isolasi semacam ini dapat mengakibatkan sikap pasif dan memperburuk keadaan kemiskinan.

Menurut Zulkifli Husin (dalam Supriatna, 1997:83), Kelompok penduduk miskin di daerah pedesaan dan perkotaan umumnya bekerja sebagai buruh tani, petani kecil, pedagang kecil, nelayan, pengrajin kecil, buruh, pedagang kaki lima, pengemis, dan pengangguran. Jika tidak ditangani dengan serius, kelompok miskin ini dapat menyebabkan masalah kemiskinan kultural dan struktural yang berkelanjutan, terutama bagi generasi mendatang. Umumnya, penduduk miskin termasuk dalam "golongan residual," yaitu kelompok masyarakat yang belum mendapat perhatian dari berbagai kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, mereka kurang memanfaatkan fasilitas yang tersedia, termasuk faktor-faktor produksi. Selain itu, keterampilan mereka terbatas, tingkat pendidikan rendah, pelatihan sangat minim, dan mereka kurang memanfaatkan bantuan untuk kebutuhan dasar serta perlindungan hukum atau peraturan yang tidak mendukung mereka. Kriteria lain yang terkait dengan penduduk miskin juga berkaitan dengan aspek implementasi.

2.2.2 Teori Labore Force

Sukirno (2004) menyatakan Angkatan kerja dapat diartikan sebagai jumlah pekerja atau tenaga kerja dalam suatu perekonomian pada suatu periode tertentu, yang terbagi menjadi dua kelompok: mereka yang sedang bekerja dan mereka yang menganggur namun aktif mencari pekerjaan. Angkatan kerja biasanya diukur menggunakan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), yang membandingkan jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja, yaitu antara 15 hingga 64 tahun, yang dianggap mampu memproduksi barang dan jasa..

Menurut Mantra dalam (Fudloli & Sukidin, 2015) Menjelaskan bahwa semakin tinggi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), semakin besar proporsi angkatan kerja dalam kelompok tersebut. Sebaliknya, jika jumlah penduduk yang bersekolah atau mengurus rumah tangga meningkat, maka jumlah mereka yang tidak termasuk dalam angkatan kerja juga akan bertambah, menyebabkan penurunan jumlah angkatan kerja dan menurunnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).

2.2.3 Teori Welfare State

Negara kesejahteraan, atau welfare state, juga dikenal sebagai "negara hukum modern." Tujuan utamanya tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warganya. Konsep negara hukum modern ini menempatkan eksistensi dan peran negara pada posisi yang kuat dan signifikan. (Elviandri et al., 2019).

Konsep negara seperti ini dikenal dalam berbagai literatur dengan istilah yang berbeda, seperti negara kesejahteraan (welfare state), negara penyedia layanan sosial (social service state), atau negara yang menjalankan fungsi pelayanan publik. Negara kesejahteraan merujuk pada model pembangunan yang menekankan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan peran yang lebih besar kepada negara dalam menyediakan layanan sosial untuk warganya. Dalam negara hukum modern yang menganut konsep negara kesejahteraan, tugas administrasi negara sangat luas, mencakup hampir semua aspek kehidupan masyarakat.

2.3 Hubungan Antar Variabel

2.3.1 Pengeluaran Perkapita Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Pengeluaran merupakan aktivitas yang dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Ketika pendapatan tinggi, biasanya pengeluaran juga tinggi. Sebaliknya, jika pendapatan menurun, kecenderungan rumah tangga adalah mengurangi konsumsi. Dalam konteks ini, peningkatan pengeluaran riil perkapita menandakan peningkatan pendapatan, yang pada gilirannya menunjukkan peningkatan kesejahteraan. Pengeluaran per kapita berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. Penelitian menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu unit pengeluaran per kapita dapat menurunkan persentase penduduk miskin. Selain itu, pengeluaran per kapita yang lebih tinggi berhubungan dengan peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, yang pada gilirannya dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Oleh karena itu, strategi peningkatan pengeluaran per kapita menjadi penting dalam upaya pengentasan kemiskinan.

2.3.2 Angka Partisipasi Sekolah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Tingkat partisipasi sekolah (APS) berkaitan positif dengan kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi APS, semakin banyak orang yang bisa mengakses pendidikan yang memadai. Pendidikan yang berkualitas dapat meningkatkan keterampilan, pengetahuan, serta produktivitas masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, peningkatan APS dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kemampuan individu dalam mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, meningkatkan standar hidup, dan mengurangi kesenjangan sosial.

2.3.3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Hubungan antara tingkat partisipasi angkatan kerja dan kesejahteraan masyarakat adalah kompleks. Di satu sisi, tingkat partisipasi angkatan kerja yang tinggi bisa menandakan adanya peluang kerja yang baik dan ekonomi yang kuat, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan dengan menyediakan pendapatan dan stabilitas ekonomi.

Namun, tingkat partisipasi angkatan kerja yang tinggi juga dapat menimbulkan sejumlah masalah, termasuk persaingan yang lebih ketat untuk pekerjaan, tekanan pada infrastruktur dan sumber daya, serta potensi peningkatan stres dan ketegangan sosial.

Selain itu, kualitas pekerjaan dan tingkat upah juga berperan penting dalam menentukan sejauh mana partisipasi angkatan kerja dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Faktor-faktor seperti pekerjaan yang menawarkan penghasilan yang layak, kondisi kerja yang aman, dan akses yang adil terhadap peluang kerja harus dipertimbangkan secara serius dalam mengevaluasi dampak partisipasi angkatan kerja terhadap kesejahteraan masyarakat



2.4 Kerangka Pikiran

